

**SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PIDIE
MENURUT PERSPEKTIF *AR-RIQĀBAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

DINA KEMALA SARI

NIM. 210102219

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

DINA KEMALA SARI

NIM: 210102219

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004



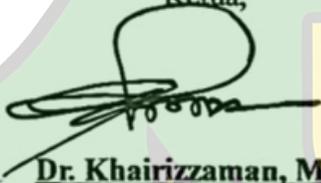
Bustaman Usman, SHI, MA
NIP. 197805102023211011

**SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PIDIE
MENURUT PERSPEKTIF *AR-RIQĀBAH***

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

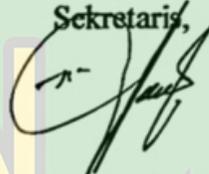
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 28 April 2025 M
16 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh:

Ketua,



Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004

Sekretaris,



Muslem, S.Ag, M.H
NIP. 197705112023211008

Penguji I



Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II



Faisal Fauzan M.Si
NIP. 197806132023211009

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dina Kemala Sari
NIM : 210102219
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2025

Menyatakan,



Dina Kemala Sari

ABSTRAK

Nama : Dina Kemala Sari
NIM : 210102219
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Pidie Menurut Perspektif *Ar-riqābah*
Tanggal Sidang :28 April 2025
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M.Ag.
Pembimbing II : Bustaman Usman, SHI, MA
Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Ar-riqābah*

Penelitian ini membahas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pengawas internal, Inspektorat bertanggung jawab dalam mencegah penyimpangan dan memastikan dana digunakan sesuai dengan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan. Besarnya alokasi dana BOS menimbulkan potensi penyalahgunaan, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, termasuk dalam hal pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta meninjau sistem tersebut dari perspektif *Ar-riqābah*. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis formal, jenis penelitiannya kualitatif atau qualitative research, secara eksklusif atau *case studie* dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat melakukan pengawasan melalui system audit yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, dan audit khusus untuk menilai kelayakan laporan keuangan, efisiensi pelaksanaan program, serta mendeteksi penyimpangan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya anggaran operasional, yang menghambat pengawasan terhadap seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Pidie, keterbatasan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Meski menghadapi kendala, Inspektorat Kabupaten Pidie tetap berupaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep *Ar-riqābah*, di mana Inspektorat melakukan pengawasan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas dengan memberikan pembinaan kepada sekolah yang melakukan penyimpangan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Pidie Menurut Perspektif *Ar-riqābah*”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik, penulis merasakan begitu besar jasa beliau dalam penyelesaian tugas akhir ini dan Bapak , Bustaman Usman, SHI, MA. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan ilmu, saran, kritik, motivasi dan evaluasi selama proses perkuliahan.
5. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya, mamak saya Suriana, S.K.M. dan ayah saya Suryadi, S.Pd. terima kasih atas kepercayaan yang telah memberi izin merantau jauh dari mereka , serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat serta kepada cinta kasih ketiga saudara saudara saya, abang Andi Baktiadi S.E. Beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan karena selalu mensupport dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan mengapresiasi setiap apa yang penulis raih dan tidak lupa juga Adik saya Firya Athirah dan Raisya Salsabila yang selalu senantiasa mendoakan penulis. Kemudian keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini cipa, tasya, nisa, nopi, dhaifa, salwa, riska, melisa, fapo,bila,nisak, jani dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
8. Saya ingin memberikan apresiasi kepada diri saya sendiri, Dina Kemala sari, atas segala perjuangan dan ketekunan yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak tantangan yang saya hadapi, saya berhasil melewati semuanya dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Terima kasih kepada diri saya yang terus bersemangat dan tidak menyerah. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk mencapai lebih banyak impian dan kesuksesan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya

terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiinn Ya Robbal 'Aalamiinn.

Banda Aceh, 15 April 2025
Penulis,

Dina Kemala Sari



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	E
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-hajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَنْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّارِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā' ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَصِيَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ

-*lallaḥī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	71
Lampiran 3 Protokol Wawancara	72
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGUNAAN UANG NEGARA	20
A. Pengertian Pengawasan dan Landasan Hukum.....	20
B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pidie	25
C. Pengawasan Penggunaan Uang Negara.....	26
D. Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31
E. Teori pengawasan dan Konsep <i>Ar-riqābah</i> Menurut Islam.....	35
BAB TIGA SISTEM PENGAWASAN PADA PELPORAN DANA BOS OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE	41
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Pidie.....	41
B. Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bos di Kabupaten Pidie	43
C. Hambatan Inspektorat Terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Bos di Kabupaten Pidie	54
D. Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bos di Kabupaten Pidie Menurut Konsep <i>Ar-riqābah</i>	57

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut undang-undang pendidikan telah menegaskan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan mutu pendidikan serta pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan serta menjamin diselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada unsur membandingkan satu sama lain.¹ Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menandakan bahwa semua lapisan masyarakat di Indonesia memiliki posisi yang sama untuk memperoleh pendidikan termasuk tanpa unsur apapun yang menghambat terpenuhinya hak-hak seseorang.

Berdasarkan pemberlakuan undang-undang tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dalam bentuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini sangat penting untuk menunjang pelaksanaan dan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dana BOS diperuntukkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu serta memberikan keringanan biaya pendidikan sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pemerintah secara khusus memberikan dana BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS yang diberikan pemerintah adalah dalam pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang

¹ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Petunjuk Terknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan dengan adanya Lembaran Pertanggung Jawaban (LPJ) yang menganut sistem Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), maka satuan pendidikan atau sekolah yang sudah menerima transfer dana dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan wajib membuat Lembaran Pertanggung Jawaban (LPJ) yang bertujuan agar Dinas Pendidikan dan Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan yang dipercayakan secara transparan kepada publik dan pemerintah. Setiap Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil laporan penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk pertanggung jawaban keuangan supaya tidak terindikasi *mark up* atau penyelewengan anggaran negara.²

Dalam perspektif Islam, pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, termasuk dana pendidikan, merupakan suatu kewajiban moral dan sistemik yang dikenal dengan istilah *ar-riqābah*. Istilah ini mencakup tidak hanya pengawasan administratif yang dilakukan oleh lembaga formal seperti Inspektorat, tetapi juga pengawasan internal yang bersumber dari kesadaran diri bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan dana negara, termasuk dana BOS, harus dilakukan dengan penuh amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, harta negara adalah milik umat, bukan milik pribadi pejabat, dan penggunaannya akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia melalui hukum positif, tetapi juga di

² Anisa Rahayu dan Endang Larasati Setianingsih, "Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung", *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, hlm. 2.

akhirat. Nilai-nilai seperti amanah, transparansi, akuntabilitas dan ihsan menjadi prinsip utama dalam menjalankan *ar-riqābah* terhadap pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks program BOS, penerapan prinsip *ar-riqābah* sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan pendidikan. Fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dilihat tidak hanya sebagai pelaksana audit teknis, tetapi juga sebagai representasi dari sistem pengawasan yang menjunjung tinggi nilai etik dan spiritual Islam. Ketika pengawasan dilakukan tanpa memperhatikan aspek moral dan hanya bersifat prosedural, maka penyimpangan cenderung mudah terjadi, seperti dalam kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS yang terjadi di Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis *ar-riqābah* menjadi sangat relevan, agar dana BOS benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi maupun ukhrawi. Pemerintah harus memastikan pengawasan terhadap penggunaan harta negara dilakukan dengan baik, serta memastikan anggaran yang berasal dari harta negara digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan yang sah.³

Dinas Pendidikan dan Inspektorat selaku pengawas internal bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS bertujuan untuk menghindari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya di luar dari komponen pembiayaan serta perencanaan dalam pemenuhan semua kebutuhan sekolah. Pengalokasian dana dengan jumlah yang banyak ini mengakibatkan rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan tujuan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya pengawasan agar penyelenggaraan

³ Maharani Wicahyaningtyas, "Controlling Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, hlm. 38.

dana BOS berjalan secara efektif dan efisien dan meminimalisir permasalahan dalam proses pembuatan laporan.⁴

Dikutip dari berita *online* Pada Maret 2023 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kas dana BOS tahap pertama tahun 2023 di sejumlah sekolah di Pidie, salah satunya yaitu SDN 1 Sigli. Dalam pemeriksaan pada 18 Maret 2023, BPK menemukan bahwa Kepala Sekolah SDN 1 Sigli, Nana Rosita melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS, yang bertentangan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dalam kasus tersebut tindakan evaluasi hanya dilakukan oleh pihak BPK sedangkan pihak Inspektorat Kabupaten Pidie tidak melakukan tindakan evaluasi. Sehingga persentase penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkat.⁵

Dikutip dari portal berita *online*, pada tahun 2021 Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten Pidie, berinisial S, diduga melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 2,7 miliar pada tahun 2021. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi S dan beberapa pihak lain. Pada tahun 2022 kasus ini terungkap setelah laporan dari masyarakat dan diusut oleh Kejaksaan Negeri Pidie.⁶

Berdasarkan kasus tersebut adanya keterlambatan dalam penemuan penyimpangan pada kasus ini baru terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2022. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan evaluasi yang membuat penyimpangan dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya terdeteksi. Penemuan yang lambat dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi negara. Berdasarkan kasus ini bisa dipahami bahwa permasalahan hilangnya

⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵ Candra Saymima, 02 Oktober 2023, <https://sinarpidie.co/news/cara-kepala-sekolah-di-pidie-kelola-dana-bos/index.html> diakses pada 12 Juni 2024.

⁶ Candra Saymima, 18 Maret 2022, <https://www.acehtrend.com/news/yara-surati-kejari-pidie-terkait-dugaan-korupsi-dana-bos/index.html> diakses pada 1 Mei 2024.

pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS disebabkan oleh Kepala Satuan Pendidikan saja yang bertugas mengelola dana BOS, namun pada dasarnya penyalahgunaan ini bukan semata-mata terjadi dari pihak yang mengelola dana BOS ini, melainkan juga menjadi pertanyaan terhadap akuntabilitas sistem pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh APIP sebagai unsur pengawas terhadap penggunaan dana BOS yang diselenggarakan dari APBN.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti melalui sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Pidie Menurut Perspektif *Ar-riqābah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie?
2. Apa saja hambatan Inspektorat terhadap pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie?
3. Apakah sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan konsep *Ar-riqābah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui system pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui hambatan Inspektorat terhadap pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie.

3. Untuk mengetahui tinjauan teori *Ar-riqābah* terhadap pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie.

D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah pada proposal ini dipaparkan penulis sebagai salah satu komponen yang terpenting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah memberikan penjelasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pada judul dan fokus masalah penelitian. Berikut ini beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan, di antaranya:

1. Sistem Pengawasan

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, *system* didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.⁷

Pengawasan merupakan proses pengamatan ataupun suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standard, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standard tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.⁸

Sistem pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pengamatan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan yang diajukan oleh kepala satuan pendidikan mengenai penggunaan

⁷ Nur dan Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 89.

⁸ Rahmawati Sururana dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung:Cendekia Press,2020), hlm. 16.

dana BOS. Pengawasan dalam pelaporan menjadi kunci kejelasan untuk memastikan transparansi terkait penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

2. Inspektorat

Inspektorat adalah salah satu unit kerja di pemerintah daerah yang setingkat dengan berbagai unit kerja baik dinas maupun badan, Inspektorat merupakan suatu lembaga teknis khusus di bidang pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan *intern*.⁹

Dalam penelitian ini Inspektorat Kabupaten Pidie bertindak sebagai badan yang bertugas untuk mengevaluasi terhadap pelaporan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie.

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2016, BOS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi biaya operasional non personalia di satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS yang dimaksud pada penelitian ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap unit pendidikan. Pengelolaan dana tersebut harus melalui evaluasi dari lembaga pengawas *intern* pemerintah, seperti Inspektorat, untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

4. *Ar-riqābah*

Ar-riqābah dalam konteks fiqh dan hukum islam merujuk pada pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa segala tindakan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau aturan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan berfungsi untuk menjaga agar pengelolaan harta, kegiatan,

⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 63.

atau kebijakan negara tidak menyimpang dari tujuan yang baik dan tidak merugikan masyarakat.¹⁰

Secara umum, *Ar-riqābah* berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (pemerintah) untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa kepentingan publik terlindungi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencari informasi dari studi terdahulu sebagai titik pembandingan baik mengenai kelemahan maupun kelebihan yang telah ada. Selain itu referensi dari buku dan deskripsi juga dikaji untuk mendukung landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni “Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Pidie”. Beberapa studi pendahuluan tersebut di antaranya:

Pertama, tesis Slamet Panuntun, (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Al-Irsyad Gajah Demak*”, ditemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran madrasah disepakati dalam RAPBM tahunan, jika dana berasal dari pemerintah maka evaluasi langsung dilakukan pemerintah melalui laporan pertanggung jawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi langsung

¹⁰ Bambang Sugiharto, Muhammad Syaifullah, “ Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen”, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, hlm. 127.

dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan *E-Budgeting*.¹¹

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran madrasah dalam meningkatkan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif (*natural setting*) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan tahapan reduksi, *display* dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran madrasah disepakati dalam RAPBM tahunan, jika dana berasal dari pemerintah maka evaluasi langsung dilakukan pemerintah melalui laporan pertanggung jawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi langsung dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan *E-Budgeting*.

Berdasarkan pada penelitian tesis Slamet maka terdapat persamaan dengan riset yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, pada tesis tersebut penulis mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran madrasah dalam meningkatkan mutu di MA Al-Irsyad Gajah Demak. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah Sistem Pengawasan Inspektorat Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Pidie.

Kedua, penelitian jurnal yang diteliti oleh Ainul Fitri, dkk, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan judul “*Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh*” tahun 2019.

¹¹ Slamet Panuntun, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Al-Irsyad Gajah Demak*, Tesis, (Semarang: Program Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo), tahun 2015.

Penelitian ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan program dana BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak yang berpedoman pada juknis dana BOS, perencanaan program dilakukan setiap awal tahun oleh tim keuangan sekolah, dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama Inspektorat setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun.¹²

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya hambatan yang dihadapi adalah penggunaan dana BOS terbatas pada kegiatan tertentu, terlambatnya pencairan dana BOS, pencairan dana tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa, terbatasnya dana apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah, adanya pemahaman masyarakat bahwa dana BOS diberikan supaya adanya sekolah gratis.

Penelitian yang dipublikasi pada jurnal ini terdapat persamaan dengan riset yang penulis teliti yaitu terdapat pada tata cara pelaksanaan program dana BOS yang berpedoman pada juknis dana BOS dan juga pengawasannya dilakukan oleh Inspektorat. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada jurnal Ainul dkk lebih berfokus pada tata cara pelaksanaan dan hambatan terhadap dana BOS. Sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan oleh setiap satuan pendidikan.

Ketiga, penelitian jurnal yang diteliti oleh Suci Priyono, dkk, Program Studi Magister Manajemen, STIER Widya Wiwaha Yogyakarta dengan judul “*Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen*” pada tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana BOS belum mencapai tingkat optimal, analisis terhadap pengelolaan dana BOS yang telah dilakukan, evaluasi terhadap pengelolaan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah untuk

¹² Ainul Fitri dkk, “Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2019.

meningkatkan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Kebumen. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah alokasi dana BOS seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, namun alokasi tersebut telah diatur dengan batasan anggaran yang tetap, sehingga menyulitkan dalam perencanaan anggaran. Selain itu, pencairan dana BOS terlambat setiap tiga bulan, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan dana BOS menyebabkan pihak pengelola sering kali kurang memahami cara mengelola dana sesuai petunjuk teknis. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat juga menyebabkan orang tua cenderung menganggap bahwa BOS menggratiskan seluruh biaya pendidikan.¹³

Persamaan dalam penelitian Suci dkk dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengawasan dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat menurut konsep *Ar-riqābah*. Sedangkan riset Suci dkk hanya fokus membahas evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS tanpa menerapkan konsep *Ar-riqābah*.

Keempat, penelitian jurnal yang diteliti oleh Arismun, dkk, mahasiswa IAI Annur Lampung dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung*” pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dana BOS serta kendala yang dialami oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung terhadap pengelolaan dana BOS.

Pada penelitian Arismun, dkk memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas mengenai dana BOS, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Arismun, dkk membahas mengenai analisis kesesuaian terhadap pengelolaan dana BOS berdasarkan Juknis, sedangkan

¹³ Suci Priyono, dkk, “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen”, *Jurnal Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha* Yogyakarta, 2018.

penelitian penulis membahas tentang pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ratna pada tahun 2016, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “*Pengawasan Inspektorat Dalam Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Takalar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS oleh Inspektorat Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan juknis. Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Takalar memiliki berbagai permasalahan yaitu terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih sangat minim, pendanaan yang dioperasikan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih sangat minim dan regulasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar masih selalu berubah-ubah sehingga masih adanya kendala dalam pengawasan Inseptorat di Kabupaten Takalar.

Pada penelitian Ratna memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian skripsi ini fokus membahas tentang pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie. Sedangkan riset di atas fokus objek penelitian di Kabupaten Takalar.

Dari beberapa penelitian, riset, dan karya ilmiah lainnya yang telah penulis paparkan bahwa tidak ada duplikasi dan plagiasi dari penelitian yang penulis lakukan ini, karena kesamaan pada reiset-riiset sebelumnya hanya terdapat pada konsep yang digunakan ataupun pada objek kajian.

¹⁴ Arismun, dkk, “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung” *Jurnal IAI Annur Lampung*, 2022.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan landasan keilmuan. Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan data dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penelitian.¹⁵

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis formal*, yaitu salah satu pendekatan yang dilakukan melalui kajian yang membahas tentang subjek atau objek penelitian dengan didasarkan pada ketentuan hukum positif.¹⁶ Pendekatan *yuridis formal* menekankan pada aspek hukum dan regulasi yang berlaku dalam pengawasan dan evaluasi dana BOS. Hal ini penting karena dana BOS merupakan program pemerintah yang memiliki aturan dan standar yang jelas. Penggunaan pendekatan ini menunjukkan komitmen Inspektorat Kabupaten Pidie untuk memastikan bahwa pengawasan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sehingga dari pendekatan ini dapat diketahui tentang ketentuan hukum terkait penggunaan dana BOS.

Penelitian ini juga mengkaji tentang pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie yang ditinjau berdasarkan konsep *Ar-riqābah* dalam fiqh muamalah yang menekankan pada pentingnya pengawasan atau pengendalian demi terciptanya keadilan dan kesetaraan. Dana BOS, yang bersumber dari APBN, dikategorikan sebagai harta milik negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

adil dan berimbang terhadap seluruh pihak penerima dana BOS, yang mana pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan harta milik negara.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori riset kualitatif yang memaparkan penelitian data secara naratif terkait dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, atau pemikiran orang secara individual.¹⁷

Secara khusus, jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian *deskriptif analisis*, yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan data dokumentasi.¹⁸

Melalui penelitian *deskriptif analisis*, peneliti menetapkan bahwa sistem pengawasan pada penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie sudah efektif dan efisien, hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kabupaten Pidie menerapkan sistem audit yang mana terdapat audit keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, dan audit khusus. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Pidie telah berusaha memastikan pengawasan yang transparan dan akuntabel, memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 26.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan subjek atau rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Pidie yang meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden, diantaranya Inspektur pembantu wilayah III Inspektorat Kabupaten Pidie, bagian umum Inspektorat Kabupaten Pidie, Kepala sekolah SDN 2 Lala, Kepala sekolah SDN Tongpudeng.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.¹⁹ Pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literature yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep pengawasan (*Ar-riqābah*).

Sumber tersebut berupa buku-buku terkait dengan pengawasan, kepemilikan milik negara, Peraturan Bupati Pidie Nomor 24 Tahun 2023 tentang piagam audit internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Peraturan Menteri Pendidikan dan

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan jurnal serta artikel terkait penelitian yaitu sistem pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Pidie.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sistem evaluasi pada pelaporan dana BOS oleh Inspektorat Kabupaten Pidie, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dalam penggunaan teknik dan instrumen yang satu dengan lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrumen penelitian yakni penulis sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.²⁰

Adapun pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah 4 responden yaitu Inspektur pembantu wilayah III Inspektorat Kabupaten Pidie, bagian umum Inspektorat Kabupaten Pidie, Kepala sekolah SDN 2 Lala, Kepala sekolah SDN Tongpudeng.

²⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 58.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti.²¹ Melalui observasi ini penulis meninjau secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga mengetahui lebih detail bagaimana sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah di kabupaten pidie.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen secara sistematis, dokumen ini dapat berupa gambar atau foto ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan dalam penelitian. Di antara data dokumentasi yang menjadi sumber primer riset ini yaitu Peraturan Bupati Pidie Nomor 24 Tahun 2023 tentang piagam audit internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, juknis pelaksanaan terkait penggunaan dana BOS dan laporan hasil akhir penggunaan dana BOS.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga **A** mudah **R** untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Setelah semua data yang terkumpulkan tentang aspek apa saja yang berkaitan dengan sistem pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Pidie yang ditinjau berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 terhadap pelaporan penggunaan dana BOS dan ditinjau

²¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018) hlm. 94

²² Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

berdasarkan konsep *Ar-riqābah*, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data.

Semua data yang diperoleh di lapangan baik itu hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun dokumentasi yang menunjukkan hasil penelitian. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada.

Metode deskriptif analisis ini bertujuan agar penelitian yang diteliti mudah dipahami dan mendapatkan keabsahan serta kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Kemudian pada tahap akhir penyusunan data dilakukan dengan penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan data yang diperoleh menjadi objek penelitian.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data yaitu dengan teknik wawancara yaitu menggunakan kertas dan pulpen untuk mencatat serta *recorder* (alat perekam) untuk merekam apa yang disampaikan oleh pemberi data. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat serta kamera untuk mengambil gambar atau video apa saja yang dilihat dari objek penelitian. Selain itu dokumentasi juga dapat berupa buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan jurnal dan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga berpedoman terhadap Permendikbudristek Nomor

63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Buku-buku fiqh muamalah, skripsi terdahulu dan beberapa jurnal. Berdasarkan pedoman di atas, penulis berusaha dan berupaya menyusun hasil penelitian menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasannya tersendiri secara sistematis serta saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan umum mengenai landasan teoritis tentang pengertian dan landasan hukum pengawasan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, pengawasan penggunaan uang negara, pengawasan penggunaan dana BOS dan teori pengawasan dan konsep *Ar-riqābah* menurut Islam.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang memuat tentang gambaran umum Inspektorat Kabupaten Pidie, tahapan pengawasan Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie, hambatan Inspektorat terhadap pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie, tinjauan teori *Ar-riqābah* terhadap pengawasan penggunaan dana BOS di Kabupaten Pidie.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah.